

**SISTEM INFORMASI DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN BREBES**

SUYUDI

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Komputer Yos Sudarso Purwokerto

ABSTRACT

This research entitled : "Management System Information for Region Development Planning at The Office of Region Development Planning (Bappeda) of Brebes Regency". This research was aimed to describe application of management information system in development planning of Brebes Regency was conducted in Bappeda of Brebes Regency.

This research was conducted in Bappeda of Brebes Regency as leading sector in development planning. Research's target is apparatus of Bappeda of Brebes Regency. Research method used qualitative method, sampling method used purposive technique, data collecting method used in depth interview, observation and documentation. Data analyzed technique used interactive model analysis.

Result of research showed that development planning process Bappeda of Brebes Regency done by convergence of top down and bottom up mechanism. Top down planning done through data synchronization about development planning program which released by central government through passing Propenas and province government through Province Propeda. For a while, bottom up mechanism done by data collected by SKPD, result of Musrenbang, public aspiration. Through top down and bottom up mechanism so the development planning earn as according to public aspiration and or local real needed and the other side do not oppose against the development program which have been marked by vertical government. Application of information system in compilation development planning in Bappeda of Brebes Regency done by computer using as main peripheral functioned to process the input and data processing. But, the computer exploiting not yet been supported with a special software designed for the activity of development planning. Process of the input and processing still be done manually program by using Microsoft Excell Program.

Keywords : Bappeda, Development Planning, Information System.

I. PENDAHULUAN

Dalam melaksanakan pembangunan, pemerintah dihadapkan pada pilihan tentang kegiatan apa saja yang hendak didahulukan pelaksanaannya, untuk itu perlu perencanaan yang matang. Dalam proses pembangunan, perencanaan merupakan aspek penting karena merupakan salah satu sistem yang digunakan untuk mengatur alokasi sumber daya yang terbatas. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses atau tahapan pengarah kebutuhan pembangunan di daerah yang melibatkan interaksi antara sumber daya manusia dengan sumber daya lain termasuk sumber daya alam dan lingkungan. Pembangunan daerah dianggap penting karena kegagalan pembangunan di daerah akan memberikan dampak negatif terhadap pembangunan secara keseluruhan.

Kabupaten Brebes merupakan salah satu daerah yang tengah giat melaksanakan pembangunan untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Agar realisasi pembangunan di Kabupaten Brebes dapat berjalan dengan terencana, teratur dan sistematis maka diperlukan adanya suatu sistem informasi manajemen yang efektif dalam perencanaan pembangunan. Sesuai dengan perkembangan terkini, sistem informasi tersebut idealnya berbasis komputer. Melalui penerapan sistem informasi dalam perencanaan pembangunan daerah maka data daerah yang komprehensif dapat diintegrasikan ke dalam file *database* daerah sehingga dengan mudah dapat diakses ketika dibutuhkan. Selain itu, data tersebut juga senantiasa dapat *diup to date* sesuai perkembangan kontemporer. Semua itu akan meningkatkan kecepatan dan efektivitas perencanaan pembangunan daerah.

Badan Perencanaan pembangunan Daerah (Bappeda) merupakan *leading sector* dalam proses perencanaan pembangunan

sehingga *ex officio* perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dan fungsi utama pada institusi ini. Oleh karenanya, sistem informasi manajemen yang cepat, mudah diakses, efisien dan efektif sangat dibutuhkan oleh Bappeda. Penelitian ini mengkaji tentang sistem informasi manajemen dalam proses perencanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Brebes.

II. LANDASAN TEORI

Sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan/atau mengendalikan organisasi (Lucas, dalam Kumorotomo, 2001:22). Definisi ini pada dasarnya menekankan bahwa informasi merupakan alat untuk mengurangi ketidakpastian yang akan senantiasa dihadapi oleh seorang manajer yang memimpin organisasi. Asumsinya bahwa anggota-anggota organisasi hendaknya lebih terbuka terhadap informasi yang datangnya dari dalam sistem organisasi maupun dari luar. Kemampuan untuk memecahkan masalah tergantung kepada kemampuan manajer dan anggota-anggota organisasi untuk menyerap informasi yang relevan dengan tugas-tugas rutin maupun tugas-tugas pengambilan keputusan.

Sistem informasi kadang juga disebut dengan sistem informasi manajemen. Gordon B. Davis (dalam Moekijat, 1988) mengatakan bahwa tidak ada persetujuan mengenai istilah “sistem informasi manajemen”, beberapa pengarang lebih suka menggunakan istilah seperti “sistem pengolahan informasi”, “sistem informasi/keputusan”, atau secara gampang “sistem informasi”, yang kesemuanya untuk menunjukkan sistem pengolahan informasi yang menggunakan komputer guna menunjang operasi, manajemen dan fungsi keputusan suatu organisasi.

Manajer-manajer masa kini dituntut untuk mampu bekerja lebih efisien dengan memanfaatkan informasi yang relevan dengan organisasi. Persyaratan ini kedengarannya merupakan hal yang sepele dan cukup mudah

dilakukan. Tetapi dengan membanjirnya segala bentuk informasi yang datang dari berbagai pihak dan semakin mudahnya memperoleh informasi secara tepat berkat dukungan teknologi yang tersedia, kemampuan untuk menyaring informasi akan merupakan masalah tersendiri bagi para manajer. Maka isu-isu yang menyangkut penggunaan informasi di dalam organisasi menjadi semakin kompleks.

Dari berbagai isu yang muncul pada sistem informasi manajemen pada umumnya, Dickson (dalam Kumorotomo, 2001:24) misalnya, merinci beberapa isu yang paling banyak muncul yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas (kemudahan memperoleh) data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai, tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi.
2. Menjamin tersedianya kualitas dan ketrampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis.
3. Mengembangkan proses perencanaan yang efektif untuk memadukan satuan pengolah data produk layanan organisasi dengan struktur organisasi, dan secara efektif mengintegrasikan fungsi-fungsi informasi administratif maupun dukungan telekomunikasi.
4. Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan ketrampilan pendukung sistem informasi, mengetahui cara-cara untuk mengembangkan ketrampilan semacam itu, dan menemukan cara-cara yang lebih baik untuk menyeleksi pegawainya.
5. Menetapkan investasi yang akan diarahkan pada sistem informasi dalam kerangka produktivitas, pertumbuhan dan peningkatan efektivitas layanan organisasi.
6. Mengantisipasi dan memahami konsekuensi-konsekuensi ekonomis dari sistem informasi dan teknologi baru.
7. Memperbaiki produktivitas dalam aplikasi pengembangan dan pemeliharaan sistem.

Informasi yang memiliki kualitas tinggi akan menentukan sekali efektivitas keputusan-keputusan manajer. Brunch & Grudnitski (dalam Kumorotomo, 2001:22) menyebutkan tiga pilar utama yang menentukan kualitas

informasi, yaitu : akurasi, ketepatan waktu, dan relevansi. Kemudian syarat-syarat tentang informasi yang baik diuraikan pula oleh Parker (dalam Kumorotomo, 2001:22), yaitu : 1) Ketersediaan (*availability*); 2) Mudah dipahami (*Comprehensibility*); 3) Relevan; 4) Bermanfaat; 5) Tepat waktu; 6) Keandalan (*reliability*); 7) Akurat; 8) Konsisten;

Tampak bahwa ada berbagai macam syarat yang harus dipenuhi bagi informasi untuk kepentingan manajemen. Pengolah data atau penyedia informasi harus memperhitungkan segi-segi waktu penyajian, isi, format maupun segi-segi lain dari informasi tersebut. Ini dapat dipahami karena di dalam organisasi-organisasi modern, kualitas informasi yang dipergunakan dalam manajemen itulah yang akan menentukan efisiensi dan efektivitas organisasi yang bersangkutan.

Para ahli manajemen mengemukakan bahwa, perencanaan merupakan fungsi utama dari manajemen yang sekaligus menjadi refleksi dari fungsi-fungsi manajemen lainnya. Adanya suatu perencanaan sudah menjadi suatu keharusan dalam organisasi baik besar maupun kecil, karena berdasarkan perencanaan itulah segala kegiatan diarahkan dan diatur untuk mewujudkan tujuan yang hendak dicapai. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, pemerintah merumuskan suatu perencanaan yang digunakan sebagai pedoman untuk mengarahkan dan mengatur setiap kegiatan pembangunan serta memberikan kemudahan dalam melakukan evaluasi masing-masing kegiatan yang dilakukan.

Menurut *The New Webster Dictionary*, seperti dikutip Hasibuan (1997:95) mendefinisikan rencana sebagai pernyataan dari segala sesuatu yang dikehendaki yang digambarkan dalam suatu pola atau peta-peta, *chart*, atau pernyataan dari bagian-bagiannya sesuai dengan pola tertentu. Kemudian Hasibuan sendiri menyebutkan bahwa rencana adalah sejumlah keputusan yang menjadi pedoman untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jadi setiap rencana mengandung dua unsur, yaitu “tujuan” dan “pedoman”. Sementara perencanaan didefinisikan sebagai pekerjaan

mental untuk memilih sasaran, kebijaksanaan, prosedur, program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.

Perencanaan pembangunan daerah sebenarnya lebih banyak ditekankan pada penerapan konsep lokasi dalam penyusunan program dan proyek pembangunan, karena keadaan geografis masing-masing daerah dalam suatu negara serta keadaan dan struktur sosial-ekonominya sangat berbeda-beda (Sibero, 1985 : 16). Hal tersebut didasari bahwa pemilihan lokasi pembangunan yang tepat akan meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi yang ada pada gilirannya akan dapat pula menggerakkan kegiatan pembangunan, tidak hanya pada daerah yang bersangkutan tetapi juga untuk pembangunan nasional secara keseluruhan.

Perencanaan pembangunan daerah sebenarnya merupakan suatu pendekatan yang logis untuk mencapai sasaran pemerataan hasil-hasil pembangunan yang lebih adil bagi rakyat dan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di luar daerah. Dengan demikian, kegiatan pembangunan daerah dimaksudkan sebagai usaha pemerataan dan menyebarkan pembangunan di daerah guna menyetarakan dan menyeimbangkan atau memperkecil perbedaan tingkat laju pertumbuhan antar daerah, serta memajukan seluruh kegiatan pembangunan di daerah dalam rangka menunjang keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan.

Proses perencanaan pembangunan daerah biasanya dimulai dari perumusan suatu pola dasar pembangunan yang bersifat umum dan berlaku jangka panjang bagi daerah yang bersangkutan hingga pembuatan rencana-rencana pembangunan yang lebih khusus yang dituangkan dalam rencana dan anggaran tahunan. Proses tersebut harus mampu menjamin kesesuaian program-program yang dilaksanakan di berbagai sektor dan subsektor dalam suatu daerah.

Dalam penyusunan perencanaan daerah akan dilalui berbagai tahapan atau langkah-

langkah yang selanjutnya akan menuju pada satu kesatuan perumusan perencanaan yang matang, objektif dan realistis. Langkah-langkah yang ditempuh dalam proses perencanaan pembangunan daerah menurut Kamarsyah (1986 : 1.9) adalah : *Pertama*, pengumpulan dan pencarian informasi dan data mengenai daerah dan masyarakat yang tinggal di daerah yang bersangkutan. Selanjutnya dari informasi dan data tersebut dilakukan analisa terhadap kondisi, kebutuhan dan potensi pembangunan, karena tanpa adanya informasi dan analisa tidak akan ada suatu landasan yang kuat untuk menunjang pola dasar pembangunan dan rencana yang akan disusun. *Kedua*, menentukan tujuan dan sasaran pembangunan secara menyeluruh bagi daerah tersebut dengan memperhatikan tujuan pembangunan nasional serta daerah tingkat yang lebih tinggi. *Ketiga*, merumuskan pola dasar pembangunan daerah untuk memenuhi tujuan jangka panjang dan merumuskan beberapa pilihan strategi rencana pembangunan daerah untuk jangka menengah. Kemudian mengikuti pilihan-pilihan strategi dan menetapkan strategi yang optimum. *Keempat*, merumuskan rencana dan anggaran tahunan berikut persetujuan dan pengesahan atas rencana dan anggaran tahunan. Bila anggaran telah disetujui maka tinggal pelaksanaan rencana atau program. *Kelima*, kegiatan monitoring pelaksanaan program dan proyek sepanjang rencana dan anggaran tahunan berjalan. Monitoring dilakukan agar pelaksanaan program dan proyek/ kegiatan sesuai dengan rencana dan juga untuk mengetahui penyimpangan yang terjadi agar dapat diluruskan kembali tepat pada waktunya. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat program dan proyek tersebut dibandingkan dengan tujuan dan sasaran yang semula direncanakan. *Keenam*, memperoleh dan menyediakan umpan balik (*feed back*) dengan memanfaatkan informasi yang diperoleh selama proses monitoring dan evaluasi. Semua informasi ini diteliti dan dianalisa, hasilnya kemudian dipakai untuk membuat keputusan yang dapat membawa perbaikan pada rencana pembangunan tahun anggaran yang akan datang.

III. METODE PENELITIAN DAN ANALISIS

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2010 di Bappeda Kabupaten Brebes. Jenis penelitian adalah kualitatif. Sasaran penelitian adalah Sasaran penelitian ini adalah aparat Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Brebes. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan *indepth interview*, observasi, dokumentasi. Fokus kajian mengacu pada 3 isu sentral dalam HELTS, yaitu daya saing, otonomi dan desentralisasi, serta kesehatan organisasi. Teknik analisis data menggunakan *interactive model of analysis*. Validitas data menggunakan triangulasi.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perencanaan pembangunan daerah membutuhkan berbagai macam data. Data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan daerah meliputi 4 (empat) macam, yaitu :

- 1) Data mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di daerah, misalnya data tentang angka kemiskinan, jumlah pengangguran, sarana prasarana yang rusak maupun yang perlu diadakan.
- 2) Data mengenai potensi yang dimiliki daerah, misalnya potensi demografi atau kependudukan (SDM), sumberdaya alam, sumber pendapatan daerah.
- 3) Kebijakan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat yang berupa Propenas (Program Pembangunan Nasional) dan pemerintah propinsi berupa Program Pembangunan Daerah (Propeda) Provinsi.
- 4) Data mengenai aspirasi-aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Data ini dapat diperoleh dari hasil Musrenbang serta masukan-masukan dan usulan-usulan dari sumber lain, misalnya dari masyarakat langsung, melalui DPRD, LSM, Ormas dan lain-lain.

Mekanisme yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Brebes dalam menggali data untuk keperluan perencanaan

pembangunan daerah terdiri dari 7 (tujuh) cara sebagai berikut :

- 1) Meminta data kepada SKPD-SKPD.
- 2) Menginventarisir potensi daerah.
- 3) Mempelajari peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan.
- 4) Melakukan monitoring dan evaluasi serta survei.
- 5) Melakukan koordinasi antardaerah, propinsi, pusat, dan pihak-pihak lain, seperti kalangan swasta/pengusaha.
- 6) Menyelenggarakan forum diskusi SKPD.
- 7) Hasil pelaksanaan Musrenbang (Musawarah Pembangunan Daerah)

Melalui penggalan data dari berbagai sumber maka data yang diperoleh secara kuantitas sangat banyak serta komprehensif. Semua itu tidak lepas dari karakter kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembangunan, yang meliputi berbagai macam bidang, baik fisik maupun non fisik, sesuai dengan kebutuhan masyarakat beserta kondisi wilayah yang sangat bervariasi. Selain itu, dinamika pembangunan juga diwarnai oleh arah kebijakan dan tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dalam pembangunan, sesuai dengan visi-misi daerah, dan rencana strategis.

Data yang diperoleh Bappeda Kabupaten Brebes dari berbagai sumber dan cara merupakan bahan mentah untuk keperluan perencanaan pembangunan daerah. Agar dapat diproses lebih lanjut sebagai bahan informasi untuk kegiatan perencanaan pembangunan daerah maka data tersebut terlebih dahulu harus diproses menjadi informasi.

Pengolahan data menjadi informasi dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Brebes dengan cara mengklasifikasikan atau memilih dan memilah data sesuai dengan jenis dan kebutuhannya. Selanjutnya dilakukan sinkronisasi data untuk mengecek kesesuaian dan akurasi data antara satu sumber dengan sumber lainnya. Dengan langkah demikian maka data yang sudah diproses sudah berubah menjadi suatu informasi dan informasi inilah

yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Pengolahan informasi dalam perencanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Brebes menggunakan sistem input-output. Input berisi berbagai hal menyangkut jenis-jenis kegiatan yang telah disetujui untuk dimasukkan dalam kegiatan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya. Sementara output berisi hasil/sasaran yang ingin dicapai dari program pembangunan yang telah disetujui untuk dilaksanakan dalam tahun anggaran berikutnya.

Mekanisme pengolahan informasi dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Brebes dilakukan melalui perpaduan 2 (dua) cara, yaitu *top down planning* dan *bottom up*. *Top down planning* dilakukan melalui sinkronisasi data tentang perencanaan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Propenas dan pemerintah provinsi melalui Propeda Provinsi. Sementara mekanisme secara *bottom up* antara lain dilakukan melalui data yang dijaring oleh SKPD, hasil Musrenbang, penjangkaran aspirasi masyarakat.

Mekanisme pengelolaan data dalam perencanaan pembangunan didesain dalam sebuah sistem yang disebut Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sisrenangda). Sisrenbangda adalah sebuah sistem informasi yang dimanfaatkan oleh Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) dalam menghimpun data-data daerah ke dalam *file database* sehingga ketika dibutuhkan akan cepat didapat. Sisrenbangda juga dapat dimanfaatkan oleh instansi lain atau pihak luar seperti mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan data-data dari Pemkab atau Pemkot. Informasi-informasi yang ada disajikan dalam tampilan tabel, grafis, dan tampilan multimedia yang menarik.

Untuk mendukung kelancaran proses perencanaan pembangunan maka aspek sarana prasarana yang dibutuhkan cukup diperhatikan.

Sarana prasarana tersebut senantiasa diupayakan agar sarana prasarana yang dibutuhkan tersedia dengan lengkap dan memadai, serta memiliki kesiapan untuk digunakan setiap saat. Sarana utama yang digunakan dalam proses perencanaan pembangunan daerah di Bappeda Kabupaten Brebes adalah komputer dengan segala peralatan pendukungnya, seperti printer, scanner, dan lainnya.

Aplikasi atau penerapan dari suatu Sistem Informasi Manajemen jelas membutuhkan adanya perangkat yang relevan dan memadai untuk mendukungnya. Dalam kaitan ini maka perangkat komputer merupakan perangkat utama atau bahkan terpenting dalam SIM jaman sekarang. Kumorotomo (1999) mengatakan bahwa secara teoritis SIM dapat dilaksanakan tanpa bantuan alat komputer. Akan tetapi sistem manajemen yang semakin kompleks di dalam organisasi-organisasi modern, dan juga melihat kenyataan bahwa harga perangkat keras maupun perangkat lunak komputer relatif semakin murah, unsur mesin komputer tidak dapat diabaikan peranannya. Maka setiap pembahasan tentang SIM modern sekarang ini hampir dapat dipastikan akan melibatkan pembahasan tentang sistem komputer sendiri. SIM yang berbasis komputer (*computer-based management information system*) merupakan topik inti di dalam setiap pembahasan tentang SIM.

Suatu sistem informasi manajemen yang berbasis komputer (*computer-based management information system*) terdiri dari manusia, perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), data, dan prosedur-prosedur organisasi yang saling berinteraksi untuk menyediakan data dan informasi yang tepat pada waktunya kepada pihak-pihak di dalam maupun di luar organisasi yang berkompeten (Parker, 1989:86). Dapat pula dikatakan bahwa SIM berbasis komputer adalah suatu SIM yang menempatkan perkakas pengolah data komputer dalam kedudukan yang penting. Sekarang ini andai orang menggambarkan SIM yang modern yang dimaksud adalah SIM yang terkomputerisasi,

sehingga gagasan-gagasan tentang komputerisasi di dalam organisasi swasta maupun publik sesungguhnya berkenaan dengan tujuan penyempurnaan sistem informasi itu sendiri.

Secara prinsipil, jalannya proses perencanaan sudah menggunakan komputer sebagai perangkat utama, namun demikian pemanfaatan komputer ini lebih banyak difokuskan pada aspek *hardware* atau perangkat kerasnya saja. Sementara aspek *softwarena* belum optimal. Ketersediaan *software* komputer yang khusus diperuntukkan bagi kegiatan perencanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Brebes belum ada. Sistem informasi manajemen tersebut masih dalam proses persiapan atau sebatas wacana yang rencananya akan direalisasikan beberapa waktu ke depan. Kondisi ini patut disayangkan karena sistem informasi manajemen berbasis komputer secara komprehensif mempunyai banyak sekali manfaat positif untuk mendukung kegiatan dalam organisasi, termasuk perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda. Kumorotomo (2001) menegaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa komputer merupakan perkakas yang sangat penting di dalam SIM modern. Alasan yang pertama berkenaan dengan kemampuan komputer untuk mengolah data. Perangkat otomatis ini dalam beberapa hal ternyata lebih unggul sebagai penyerap atau pencatat data jika dibandingkan dengan daya ingat manusia, sekalipun pengambilan keputusan tetap dilakukan oleh manusia. Dari ciri-ciri kemampuan otak manusia dan kemampuan komputer tersebut, dapat dilihat bahwa apabila keunggulan dari manusia dan komputer digabungkan akan kita peroleh kinerja yang sangat baik bagi Sistem Informasi Manajemen. Sebagian pakar bahkan mengatakan bahwa persoalan pokok di dalam SIM modern adalah bagaimana mengkombinasikan kemampuan manusia dan kemampuan komputer untuk menghasilkan keputusan manajerial yang baik.

Akibat belum adanya sistem informasi manajemen khusus untuk perencanaan pembangunan maka data yang diperoleh

Bappeda Kabupaten Brebes dari berbagai sumber masih diolah dan diproses secara manual dengan menggunakan Program *Microsoft Excell*. Hal tersebut sedikit banyak mengurangi efisiensi dan efektivitas pelaksanaan perencanaan pembangunan karena idealnya penggunaan komputer sebagai perangkat utama benar-benar dapat dioptimalkan, termasuk dengan menyediakan *software* khusus, yang bukan saja mempermudah proses perencanaan pembangunan, namun juga dapat mendukung mewujudkan efisiensi dan efektivitas secara optimal.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Proses perencanaan pembangunan di Bappeda Kabupaten Brebes dilakukan melalui perpaduan mekanisme *top down* dan *bottom up*. *Top down planning* dilakukan melalui sinkronisasi data tentang perencanaan program pembangunan yang telah dicanangkan oleh pemerintah pusat melalui Propenas dan pemerintah provinsi melalui Propeda Provinsi. Sementara mekanisme secara *bottom up* antara lain dilakukan melalui data yang dijaring oleh SKPD, hasil Musrenbang, penjaringan aspirasi masyarakat. Melalui perpaduan mekanisme *top down* dan *bottom up* maka proses perencanaan pembangunan dapat sesuai dengan aspirasi masyarakat atau kebutuhan riil daerah dan di sisi lain tidak bertentangan dengan program pembangunan yang telah digariskan oleh pemerintah vertikal.

Aplikasi sistem informasi dalam penyusunan rencana pembangunan di Bappeda Kabupaten Brebes dilakukan melalui penggunaan komputer sebagai perangkat utama yang difungsikan untuk proses input dan pengolahan data. Namun demikian pemanfaatan komputer tersebut belum didukung dengan adanya suatu *software* berupa program komputer yang didesain khusus untuk kegiatan perencanaan pembangunan. Proses input dan pengolahan masih dilakukan dengan program manual dengan menggunakan Program *Microsoft Excell*, belum menggunakan program aplikasi khusus yang disetting untuk kegiatan perencanaan pembangunan.

B. Implikasi

Segera menyediakan perangkat lunak (*software*) khusus untuk kegiatan perencanaan pembangunan daerah. Hal tersebut bertujuan agar kegiatan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efisien dan efektif serta terkoordinasi dan terintegrasi. Selain itu, perlu menyusun jaringan komputer yang terintegrasi antara Bappeda dengan seluruh SKPD untuk mempercepat dan lebih mengefektifkan proses input data..

DAFTAR PUSTAKA

- Effendy, Onong Uchyana. 1989, *Sistem Informasi Manajemen*, cetakan ke-3, CV Mandor Maju, Bandung.
- Hasibuan, Malayu, 1997, *Manajemen Dasar; Pengertian dan Masalah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Kamarsyah, Ridwan. 1986, *Materi Pokok Perencanaan Regional*, cetakan ke-1, Karunika, Jakarta.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997, *Sistem Informasi Manajemen Dalam Organisasi-Organisasi Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kumorotomo, Wahyudi. 2001, *Sistem Informasi Manajemen*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

